

## SPOTLIGHT ON

This is the first SMERU Newsletter to appear after a two-month absence. We apologize to our readers for the delay, but with a new editor on board we are intending to make amends in the near future with even better newsletters. In early December SMERU will be hosting two important events. On December 6, the Persepsi Daerah team will be reporting on the major findings arising from its numerous provincial surveys on the impact of the regional deregulation process. The following day a conference on "Monitoring the Social Impact of the Crisis: Lessons Learned in 1999" will draw on the experience of a range of individuals and organisations who have been involved in tracking the crisis over the past twelve months. We hope to report on both these events shortly. Monitoring the effectiveness of the government's set of emergency measures - the Social Safety Net Program - continues to be an important focus of SMERU's work. We include here a summary of a recent SMERU Working Paper from our data analysis group which presents some key findings drawn from the "100 Village Survey". We also report on a recent SMERU visit to Sulawesi where the involvement of NGOs in the monitoring of these SSN programs was the prime topic of discussion. We need all to be concerned for the victims of the on-going crisis and here we highlight the human dimensions of the crisis with some brief accounts drawn from our field investigations among those directly affected by the closure or down-sizing of factories and business enterprises. There are now a variety of measures underway to assist local communities and civil society recover from the crisis, and in particular to empower the poor and under privileged sections of society. In this edition we report on one such pilot project that has been moving ahead in Bandung, West Java, with assistance from SMERU. In the next issue we will report some of the key findings from our Crisis Impact team's recent appraisals of the impact of the crisis on health and education. ■ JM

Setelah absen selama dua bulan, buletin SMERU hadir kembali. Kami mohon maaf kepada pembaca atas kelambatan terbitan kami, tetapi dengan kehadiran editor baru, kami bermaksud untuk segera membayar lunas hutang kami dengan terbitan-terbitan yang lebih menarik. Pada awal bulan Desember SMERU akan menyelenggarakan dua acara penting. Dalam seminar tanggal 6 Desember, Tim Persepsi Daerah melaporkan temuan-temuan pentingnya selama melakukan penelitian di berbagai propinsi mengenai dampak proses deregulasi. Pada hari berikutnya akan diselenggarakan konferensi dengan tema "Memantau Dampak Sosial Krisis: Pengalaman di Tahun 1999" untuk menarik pengalaman dari beberapa nara sumber dan organisasi yang telah terlibat dalam menelusuri apa yang terjadi selama krisis yang berlangsung dalam dua belas bulan terakhir ini. Kami akan segera melaporkan hasil kedua acara ini dalam waktu dekat. Sementara itu, pemantauan efektivitas beberapa tindakan penanggulangan darurat oleh pemerintah, yaitu program Jaring Pengaman Sosial (JPS), tetap menjadi fokus utama SMERU. Dalam edisi ini kami tampilkan ringkasan Kertas Kerja SMERU dari Tim Analisis Data mengenai temuan-temuan kunci yang disimpulkan dari hasil studi "Survei 100 Desa". Kami juga melaporkan kunjungan SMERU ke Sulawesi. Topik utama diskusi terutama sekitar keterlibatan LSM dalam pemantauan program JPS. Kita perlu peduli pada mereka yang telah menjadi korban krismon, dan karena itu kami tampilkan dimensi manusia selama krisis melanda melalui cuplikan singkat dari pengamatan lapangan mengenai mereka yang secara langsung terimpas oleh tutupnya dan penutupan pabrik-pabrik dan usaha-usaha dagang. Ada beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk mendukung masyarakat lokal dan masyarakat madani dalam memulihkan dirinya setelah dilanda krisis, terutama untuk memberdayakan si miskin dan kelompok-kelompok kurang mampu. Edisi ini memuat tulisan mengenai suatu proyek rintisan di Bandung, Jawa Barat, yang sudah melangkah kedepan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Proyek ini didukung oleh SMERU. Dalam edisi yang akan datang akan kami sajikan beberapa temuan penting terbaru Tim Dampak Krisis mengenai perkiraan dampak semasa krisis terhadap kesehatan dan pendidikan. ■ JM



## Konsorsium LSM Berbasis Luas & Kelompok Masyarakat Madani

### A Broad-based NGO & Civil Society Group Consortium: The Bandung Experience

#### Background

By the end of 1998 SMERU, together with local NGO partners, started Community-based Monitoring of the Social Safety Net (SSN) programs in Kotamadya Bandung, Kotamadya Jakarta Utara, and Kabupaten Lombok Barat. During the development of the pilot projects, SMERU had to respond to the requests from the members of the NGO consortium in Kabupaten Lombok and a civil society forum in Bandung (later known as SAWARUNG) to move beyond monitoring government programs. These organizations saw the need to develop a system that would enable them to control the bureaucracy that implements government programs. They also wished to create a mechanism to allow them to participate fully in decision-making processes, including the design and implementation of development programs.

To participate in this way, communities need to be supported by a constantly up-to-date and accurate database network concerning local conditions, resources, and development needs and problems. Data at the community level is best collected and updated by the community itself. SMERU's role is to facilitate the development of this Community-based Information Network for Development Planning (COMBINE) initiated by local stakeholders. The goal is gradually to promote the implementation of 'Local Good Governance' throughout Indonesia.

#### Rationale

The rationale for the establishment of the Community-based Information Network (COMBINE) is as follows:

- By 2001 when the central government's regional autonomy policy has been put in place, regional governments will have to be more efficient and competitive;
- Efficiency and competitiveness can only be achieved by developing a transparent and accountable public service management system;
- Efficiency and competitiveness will require the development of a system of governance based on the recognition of local conditions, development needs and resources;
- Identification of local conditions, development needs and resources requires the development of a nation-wide but locally specific social infrastructure in the form of inclusive and participatory Community Forums at the Kelurahan and the Kecamatan levels, and Trans-actor Forums at the Kabupaten level or certain development areas (kawasan);
- Such Community Forums should be based on both residential and non-residential communities, such

#### Latar Belakang

Pada akhir tahun 1998 SMERU bersama beberapa mitra LSM telah membentuk Pemantauan Swadaya Masyarakat (PSM) terhadap program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kotamadya Bandung, Kotamadya Jakarta Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Pada saat pengembangan proyek rintisan tersebut, SMERU harus menanggapi permintaan anggota Konsorsium LSM di Kabupaten Lombok Barat dan suatu kelompok masyarakat madani di Kotamadya Bandung (kemudian dikenal sebagai SAWARUNG), bahwa masyarakat ingin melakukan lebih dari sekedar memantau program pemerintah. Masyarakat ingin menciptakan suatu sistem yang memungkinkan mereka mengendalikan para birokrat pelaksana program-program pemerintah. Mereka juga ingin menyusun suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperanserta penuh dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

Agar dapat berperanserta penuh, masyarakat perlu didukung oleh data paling mutakhir dan jaringan database yang akurat mengenai kondisi lokal, potensi, serta kebutuhan dan masalah pembangunan lokal. Data pada tingkat komunitas yang terbaik adalah data yang dihimpun dan dimutakhirkan oleh masyarakat itu sendiri. Peran SMERU disini adalah memfasilitasi pengembangan Community-based Information Network for Development Planning (COMBINE) atau Jaringan Informasi Berbasis Komunitas untuk Perencanaan Pembangunan yang akan dibentuk oleh berbagai pihak masyarakat yang berkepentingan. Sasarannya adalah agar secara bertahap dapat tercipta 'Pemerintahan Daerah yang Baik' di seluruh Indonesia.

#### Dasar Pemikiran

COMBINE perlu dikembangkan berdasarkan pemikiran :

- Bila kebijakan otonomi daerah telah diberlakukan pada tahun 2001, pemerintah daerah sudah harus lebih efisien dan mampu bersaing;
- Efisiensi dan berdaya saing hanya dapat dicapai melalui sistem pengelolaan layanan publik yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- Efisiensi dan berdaya saing menuntut pengembangan sistem pemerintahan yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan serta potensi lokal;
- Identifikasi kondisi dan kebutuhan serta potensi lokal mensyaratkan pengembangan Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal dalam bentuk Forum Warga yang berbasis luas dan bersifat partisipatif pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta adanya Forum Lintas Pelaku

as the community of street vendors, porters, and traders in traditional markets;

- The nation-wide but locally specific social infrastructure is not a project in itself, but a set of broadly-based and participatory development institutions that can be used by different government and non-government programs for community empowerment;
- These inclusive and participatory forums will give community and civil society groups the opportunity to develop a bottom-up community-based information system, providing a database of local development needs, resources, and problems;
- The nation-wide but locally specific social infrastructure will allow the community to act as a pressure group to achieve good local governance. Furthermore, it can also be used to identify those available resources to increase local revenues.



A Trans-village Forum in Kecamatan Sekotong, Kabupaten West Lombok, evaluating the results of monitoring the implementation of the SSN programs  
*Pertemuan Forum Lintas Desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sedang mengevaluasi hasil pemantauan pelaksanaan program JPS.*

- pada tingkat Kabupaten atau di kawasan tertentu;
- Forum Warga semacam ini dapat dibentuk berdasarkan lokasi kediaman atau lainnya, misalnya: masyarakat pedagang kaki lima, buruh angkut, pedagang pasar, dsb;
- Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal bukanlah suatu proyek, tetapi adalah sekumpulan berbagai lembaga pengembang yang bersifat partisipatif yang dapat digunakan oleh program pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat;

- Forum yang melibatkan berbagai pihak dan bersifat partisipatif ini akan memungkinkan masyarakat dan kelompok-kelompok madani mampu mengembangkan sistem informasi 'bottom-up' yang akan menjadi database tentang kebutuhan, potensi dan masalah pengembangan masyarakat;

**Konsorsium LSM berbasis luas dan kelompok masyarakat madani SAWARUNG di Bandung**  
**Broad-based NGOs and Civil Society Groups within the SAWARUNG Consortium**

No	Name of NGOs and civil society groups <i>Nama LSM dan Kelompok Masyarakat Madani</i>	Field of activities <i>Jenis Kegiatan</i>
1	Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman Indonesia (AKPPI-Pusat) **	Development consultant on community management/ <i>Konsultan pembangunan mengenai pengelolaan masyarakat</i>
2	Asosiasi Pemukiman Kooperatif (ASPEK)	Community network of cooperative settlements/ <i>Jaringan masyarakat untuk koperasi pemukiman</i>
3	Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)*	Study and analysis of good governance/ <i>Studi dan analisis pemerintah yang baik</i>
4	Bandung Peduli	Food relief and community development/ <i>Bantuan pangan, pengembangan masyarakat</i>
5	Computer Network Research Group (CNRG) – Institut Teknologi Bandung	Research on computer networks and information systems/ <i>Riset mengenai jaringan komputer dan sistem informasi</i>
6	Gerakan Lumbung Kota (GLK) **	RW-based urban community movement/ <i>Gerakan masyarakat kota berbasis RW</i>
7	Institute of Community Organizer (ICO)	Training of facilitators, advocacy/ <i>Pelatihan untuk fasilitator, advokasi</i>
8	Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) **	Advocacy to farmers and agricultural issues/ <i>Advokasi untuk petani dan isu-isu pertanian</i>
9	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER)*	Economic empowerment of communities & small businesses/ <i>Pemberdayaan ekonomi masyarakat &amp; pedagang kecil</i>
10	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Parahyangan	Community advocacy and empowerment/ <i>Advokasi dan pemberdayaan masyarakat</i>
11	Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Pajajaran*	Community advocacy and empowerment/ <i>Advokasi dan pemberdayaan masyarakat</i>
12	Lembaga Pengembangan Sumberdaya Pedesaan (LPSP)	Empowerment of small businesses/ <i>Pemberdayaan masyarakat pedagang kecil</i>
13	Praxis	Advocacy, training of facilitators, development studies/ <i>Advokasi, pelatihan fasilitator, studi pembangunan</i>
14	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat **	Planned parenthood issues/ <i>Isu-isu keluarga berencana.</i>
15	Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil	Micro enterprises, small-scale agro-business/ <i>Usaha kecil,</i>

	(PUPUK) **	<i>industri kecil di bidang pertanian</i>
16	Yayasan Akatiga **	Research/ <i>Penelitian</i>
17	Yayasan Anak Merdeka (YAM)	Advocacy for street children/ <i>Advokasi untuk anak jalanan</i>
18	Yayasan Bina Karya	Housing for workers, education for workers/ <i>Perumahan untuk pekerja, pendidikan untuk pekerja</i>
19	Yayasan Bumi Swadaya Bhakti (YBSB)	Micro-finance/ <i>Pendanaan mikro</i>
20	Yayasan Iqbal	Religion and small business/ <i>Keagamaan dan perdagangan kecil</i>
21	Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM) Dynamic*	Environmental issues/ <i>Isu-isu lingkungan</i>
22	Yayasan Pendidikan Alternatif (YPA)	Alternative education/ <i>Pendidikan alternatif</i>
23	Yayasan Pengembangan Swadaya masyarakat (PESAT)	Infrastructure, sanitation, provision of clean water/ <i>Infrastruktur, sanitasi, pengadaan air bersih</i>
24	Yayasan Setia Budi Utama (YASBU)	Environment and provision of clean water/ <i>Lingkungan dan pengadaan air bersih</i>
25	Yayasan Sidikara	Health, campaign against AIDS/ <i>Kesehatan, kampanye anti AIDS</i>

\* Recently joined Sawarung, October 30, 1999/Baru bergabung dengan Sawarung, 30 Oktober 1999

\*\* Members of the Sawarung Presidium/Anggota Presidium Sawarung.

### Sawarung, the Bandung experience

One of the lessons learned from SMERU's three pilot projects is that the establishment of COMBINE is best preceded by the formation of a broad-based NGO and civil society consortium. These two elements can be the driving force in establishing an inclusive and participatory locally specific social infrastructure. As a result, various development actors should implement COMBINE in a decentralized manner, while SMERU will only play the role of facilitator in this process.

In Bandung, following the formation of a Kelurahan Community Forum in Cibangkong that was facilitated by SMERU, several NGOs and civil society groups started to discuss the need to form a single broadly based consortium. Eventually, 18 NGOs and civil society groups established a consortium called SAWARUNG (Saresehan Warga Bandung) on July 27, 1999. At present Sawarung has grown to include 25 members. In the near future, the formation of similar consortiums by other communities will be able to draw on lessons learned from SMERU's Bandung experience. The struggle to build good governance at the community level within the context of COMBINE rests in the hands of those consortiums of broad-based NGOs and civil society groups such as SAWARUNG. ■ AI

- Jaringan nasional infrastruktur sosial berciri lokal ini akan memungkinkan masyarakat bertindak sebagai kelompok penekan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, juga untuk mengidentifikasi potensi lokal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

### Sawarung (Saresehan Warga Bandung)

Pengalaman SMERU dari tiga proyek pilotnya adalah bahwa pengembangan COMBINE sebaiknya didahului dengan pembentukan suatu konsorsium yang terdiri dari LSM berbasis luas dan kelompok-kelompok masyarakat madani. Kedua unsur ini dapat bertindak sebagai motor penggerak untuk membentuk suatu infrastruktur sosial berciri lokal yang berskala nasional yang berbasis luas dan partisipatif. COMBINE harus dilaksanakan secara desentralisasi oleh pelaku-pelaku pembangunan di daerah, sementara SMERU hanya berperan sebagai fasilitator.

Di Bandung, setelah SMERU memfasilitasi pembentukan Forum warga Kelurahan di Cibangkong, beberapa NGO dan kelompok masyarakat madani mulai mensosialisasikan kebutuhan agar membentuk suatu konsorsium berbasis luas. Hasilnya, pada tanggal 27 Juli 1999, SAWARUNG dibentuk oleh 18 LSM dan beberapa kelompok masyarakat madani. Saat ini SAWARUNG sudah mempunyai 25 anggota. Di waktu yang akan datang, pembentukan konsorsium yang sama oleh masyarakat di lokasi-lokasi lainnya akan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman SMERU di Bandung. Upaya menciptakan pemerintah yang baik pada tingkat komunitas dalam konteks pelaksanaan COMBINE terletak ditangan konsorsium-konsorsium LSM berbasis luas dan kelompok masyarakat madani seperti SAWARUNG ini. ■ AI

For more information, please contact/Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Alexander Irwan (SMERU) 021-3909317 or/atau Buyung Budiafrian (SAWARUNG) 022-2532429.



A chance to meet and hold discussions with local community and informal leaders in Desa Sekotong Tengah, West Lombok. *Kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat.*

## SMERU Berkunjung ke Sulawesi

### SMERU Visits Sulawesi

Following SMERU's visit to Kalimantan to learn more about NGOs in the region and the extent of their involvement in SSN program monitoring, last August SMERU traveled to Sulawesi. We held discussions there with NGOs (see list below) from six districts in four provinces: Kabupaten Kendari and Kotamadya Kendari in South East Sulawesi, Kotamadya Ujung Pandang in South Sulawesi, Kotamadya Palu and Kabupaten Donggala in Central Sulawesi, and Kotamadya Manado in North Sulawesi. We also talked to officials in each of the Level II Bappeda offices in these areas.

The purpose of our visit was (1) to increase people's understanding of SMERU's activities and to introduce a new NGO Partnership Program which seeks to promote NGO monitoring of SSN programs; (2) to establish contact with the local NGOs and learn about their particular activities and interests; (3) to investigate the availability of the SSN 1998 - 1999 program and budget Information Folder in each Level II Bappeda office and to promote the use of these folders as an information resource for both NGOs and local government; and (4) to find out more about the key problems during the implementation of the SSN program in these areas.

During our discussions with NGOs, SMERU learned that several have already been involved as local consultants for SSN monitoring and related poverty alleviation programs, while others have been conducting their own independent SSN monitoring. Many other NGOs indicated keen interest in undertaking such activities. Some of them suggested establishing a consortium, so that they can conduct monitoring together, avoiding competition among the NGOs when applying for funding.

The SMERU team discovered that the SSN Information Folders were complete and had been disseminated to the designated NGOs in 4 of the 6 districts we visited. However, this had not yet occurred in Kotamadya Palu and Kabupaten Donggala in Central Sulawesi.

Bappeda officials stated their readiness to collaborate with any organizations that wished to become involved in SSN monitoring. However, questions were raised by some NGOs about how to prevent any misunderstanding on the part of local government officials regarding NGO monitoring. SMERU has subsequently sent to several NGOs a copy of a letter from BAPPENAS endorsing independent NGO monitoring, and clarifying the legality of such activities.

SMERU would like to thank all those NGO staff members for their assistance and sincere welcome during our visit to Sulawesi. We hope to continue our collaboration and networking with you in the future. ■ HS

Setelah mengunjungi Kalimantan untuk mengenal lebih dekat keberadaan dan keterlibatan LSM dalam kegiatan pemantauan program JPS di wilayah tersebut, selanjutnya pada bulan Agustus yang lalu SMERU mengunjungi Sulawesi. SMERU mengunjungi LSM lokal (lihat daftar) di 6 kabupaten di 4 propinsi, yaitu: Kabupaten Kendari dan Kotamadya Kendari di Sulawesi Tenggara, Kotamadya Ujung Pandang di Sulawesi Selatan, Kotamadya Palu dan Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah, dan Kotamadya Manado di Sulawesi Utara. SMERU juga berdiskusi dengan pejabat Bappeda Tk II di propinsi-propinsi yang dikunjungi.

Tujuan kunjungan ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman tentang kegiatan SMERU, terutama mengenai ?NGO Partnership? untuk memperkenalkan pemantauan program JPS oleh LSM; (2) membangun komunikasi dengan LSM, mempelajari minat khusus dan kegiatan mereka; (3) memeriksa kelengkapan dan ketersediaan Folder Informasi JPS di Bappeda Tk II, dan menerangkan kegunaan folder tersebut sebagai sumber informasi bagi LSM dan pemerintah daerah; dan (4) agar mengetahui masalah-masalah utama yang ditemui selama pelaksanaan program JPS di daerah yang dikunjungi.

Dari diskusi bersama rekan-rekan LSM diketahui bahwa beberapa LSM daerah sudah terlibat sebagai konsultan untuk memantau program JPS dan program lain yang berkaitan dengan upaya pengangkatan kemiskinan, sementara yang lain telah melakukan kegiatan pemantauan swadaya. Banyak LSM sangat berminat turut melakukan kegiatan pemantauan program JPS. Beberapa dari mereka ingin membentuk suatu konsorsium agar dapat bersama-sama melakukan pemantauan, disamping dapat mencegah ?persaingan yang tidak perlu? antar LSM dalam pengajuan dana.

Tim SMERU juga menemukan bahwa Folder Informasi JPS sudah lengkap dan disebarkan kepada LSM yang ditunjuk di 4 dari 6 kabupaten/kotamadya yang dikunjungi, kecuali di Kotamadya Palu dan Kabupaten Donggala di Sulawesi Selatan. Pejabat Bappeda menyatakan kepada SMERU bahwa mereka siap bekerjasama dengan organisasi yang ingin terlibat dalam pemantauan JPS.

Dalam diskusi dengan LSM muncul pertanyaan mengenai cara mencegah timbulnya kesalah-pahaman dari pihak pemerintah mengenai kegiatan pemantauan oleh LSM. SMERU kemudian mengirimkan copy surat BAPPENAS yang menyatakan dukungan BAPPENAS kepada LSM yang melakukan pemantauan independen dan menjelaskan mengenai keabsahan kegiatan tersebut.

SMERU mengucapkan terima kasih atas bantuan dan penerimaan rekan-rekan LSM ketika SMERU berkunjung ke Sulawesi. Semoga kerjasama dan jaringan kerja kita dapat terus kita bina. ■ HS

For more information, please contact/Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Hariyanti Sadaly (SMERU), telp. 021-3909317.

NGOs met in Sulawesi/NGO yang ditemui di Sulawesi:

**South East Sulawesi/Sulawesi Tenggara:** LEPPSEK, ACF, Sintesa, YP2SDM, Yayasan Plasma, YAKIIN, LAPPAM, Yayasan Sama, Yayasan Pelita, Yayasan Bina Insani, YAPPMI, Siklus, YAL, KADL, LPP-MPP, Yasinta, LEBMAL, Yapeli, Kesrindo, Prisma, Yayasan Buana Hijau, Wasalamata, Yapahla, LAPPAN, YKI.

**Central Sulawesi/Sulawesi Tengah:** YPR, Dopalak Indonesia, Yayasan Merah Putih, Walhi Sulteng, Evergreen Indonesia, LHB Bantaya, Yayasan Kalavata, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan, Yayasan Panji Nusantara, Yayasan Lingkar Study, Yayasan Katopasa Indonesia, Yayasan Tanah Merdeka, Yayasan Masyarakat Madani Indonesia, Yayasan Bina Potensia.

**South Sulawesi/Sulawesi Selatan:** Yaspindo, LPPI, Walda, LKPM, LP2EM, Yasindo, KRA-aids, LIPKEM, LPSP, Lekmas, LKPMP, LEPPSEM, Yalbindo, BLPM, Yayasan Ase, YBM.

**North Sulawesi/Sulawesi Utara:** FPK, Gerakan Rakyat Indonesia, Lembaga Olah Hidup, LPTP, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya, Yayasan Banua, Yayasan Dian Sulawesi, Yayasan Humaniora, Yayasan Suara Nurani, Yayasan Pamela, Yayasan Peka, Yayasan Tri Esa, Yayasan Tri Prasetya.

## AND THE DATA SAY

# Efektifitas Program Jaring Pengaman Sosial

## The Effectiveness of the Social Safety Net Program

### ■ Evidence from the 100 Village Survey / Hasil Survey 100 Desa ■

The Social Safety Net programs (or SNN) which were created by the Government of Indonesia in early 1998, were intended to help protect those families who had recently been reduced to poverty as a result of the crisis as well as those who were living in poverty long before the crisis. The programs include those designed to ensure the availability of food at affordable prices, to supplement purchasing power through employment creation, and to preserve access to critical social services, particularly in health and education.

This study is a preliminary evaluation of the effectiveness of the SSN programs in achieving their purpose of helping the poor and the needy to cope with the impacts of the crisis. It assesses the coverage of the programs among the poor and the distribution of the program benefits between the poor and the non-poor.

The data used in the analysis were collected through the December 1998 round of the '100 Village Survey' (SSD) by the Indonesian Central Agency of Statistics (BPS). The SSD, sponsored by UNICEF and implemented by BPS, collected data from 12,000 households. This survey covered 100 desa located in 10 kabupaten spread across 8 provinces. 1

Program Jaring Pengaman Sosial atau program JPS dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada awal tahun 1998 dengan tujuan untuk melindungi kelompok miskin baru akibat krisis moneter, serta mereka yang sejak semula miskin. Program JPS meliputi pengadaan bahan pangan yang terjangkau daya beli masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja, dan penyediaan akses layanan sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kajian ini merupakan suatu evaluasi awal mengenai efektivitas JPS dalam mencapai tujuannya untuk membantu mereka yang miskin ketika krisis melanda. Kajian ini dilakukan dengan mengukur cakupan program bagi keluarga miskin, dan membandingkan distribusi manfaat program di antara mereka yang miskin dan yang tidak miskin.

Data yang dianalisis berasal dari "Survey Seratus Desa" (SSD) putaran bulan Desember 1998. SSD disponsori oleh UNICEF dan dilaksanakan oleh BPS terhadap 12.000 KK. Survei ini meliputi 100 desa di 10 kabupaten yang tersebar di 8 propinsi.

Tabel 1. Cakupan dan Sasaran Program Operasi Pasar Khusus Berdasarkan Konsumsi Kuantil per Kapita  
Table 1. Coverage and Targeting of Cheap Rice Program by Per Capita Consumption Quintiles

Kabupaten, Propinsi District, Province	Jumlah Sampel Number of Sample	Cakupan Program Program Coverage (%)	Cakupan Program Relatif terhadap Kuantil 1 Program Coverage Relative to Quintile 1					Cakupan Program Program Coverage (%)	Sasaran Program Program Targeting	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5		Q2-Q5	% Q2-Q5
Rembang, Central Java/JaTeng	1,200	97.92	0.97	0.89	0.63	0.43	71.25	74.43	0.93	
Banjarnegara, Central Java/JaBar	1,200	93.75	1.03	1.00	0.96	0.71	86.67	78.71	0.98	
Kendari, Southeast Sulawesi/SulTeng	1,200	67.08	1.03	0.88	0.72	0.48	52.08	75.64	0.95	
Lampung Selatan, Lampung	1,200	58.33	0.89	0.74	0.71	0.71	44.48	75.31	0.94	
Kupang, East Nusa Tenggara/NTT	1,198	42.92	0.89	0.93	0.99	0.48	35.28	76.68	0.96	
Indragiri Hilir, Riau	1,200	34.58	0.58	0.52	0.24	0.10	12.40	58.91	0.74	
Karang Asem, Bali	1,200	34.17	1.15	0.78	0.37	0.30	22.19	72.20	0.90	
Pandeglang, West Java/JaBar	1,200	20.00	0.46	0.56	0.48	0.46	9.79	66.20	0.83	
Sumedang, West Java/JaBar	1,200	19.58	0.94	0.60	0.49	0.32	11.46	70.06	0.88	
Kutai, East Kalimantan/KalTim	1,199	5.42	2.54	3.46	4.69	3.63	19.40	93.47	1.17	

The question about the SNN programs in the SDD questionnaire asked whether or not a family 'participated' in a given program in the last three months, but did not include any attempt to estimate the magnitude of the benefits or their impacts. So the focus was not on the impacts of the crisis but simply on the coverage of the SSN program, mainly the number of the poor who participated in the program, and its targeting effectiveness, or the fraction of the program benefits that actually went to the poor.<sup>2</sup> The study was conducted in three steps: firstly, the samples in

Pertanyaan kuesioner SSD berkaitan dengan JPS hanya menyangkut apakah keluarga responden ikut atau tidak dalam program JPS yang telah diadakan selama tiga bulan terakhir. Pertanyaan tidak mencakup perkiraan mengenai besarnya manfaat atau dampak program terhadap responden. Dengan demikian fokus kajian tulisan ini adalah pada cakupan program JPS, yaitu berapa jumlah keluarga miskin yang ikut serta dalam program, dan efektivitas sasaran, yaitu berapa bagian dari manfaat program yang telah diterima oleh keluarga miskin. Kajian ini dilakukan



each kabupaten were grouped into quintiles of per capita expenditure where the first quintile (Q1) was classified as the poor, while the second to fifth quintiles (Q2-Q5) were classified as non-poor; secondly, the program coverage was calculated for each quintile to find the percentage of households in each quintile which were the program beneficiaries; and thirdly, the targeting effectiveness was calculated for each program as the ratio of participation of the non-poor in a program compared to the fraction of non-poor in the sample.

These SSN programs were selected for analysis: the so called "cheap rice" program (OPK), the labor-intensive employment creation program, and the primary school scholarship component of the SSN education program. The results of the coverage and targeting effectiveness of these selected programs implemented in fiscal year 1998/99 using the above outlined methods are presented in Tables 1, 2, and 3. In all cases, the ten kabupaten included in the survey are ranked in order from the highest to lowest program coverage.

Table 4 recapitulates the coverage of the poor and the targeting ratios in all programs from Tables 1 to 3. This table shows the magnitude of the coverage (the lowest quintile) and the targeting ratio of each program, as well as indicating the rank of each kabupaten's relative performance in each of the programs. To make it easier to identify the best performing kabupaten in each program, their coverage of the poor and targeting ratio numbers are given in bold type. For example, for the cheap rice program, the four best performing kabupaten in terms of the coverage of the poor are Rembang, Banjarnegara, Kendari, and South Lampung. In terms of the targeting ratio the four best are Indragiri Hilir, Pandeglang, South Sumedang, and Karang Asem. Identification of the best performing kabupaten in other programs has been done in the same manner.

In addition, Table 4 can be used as a score card to indicate the relative performance of any one kabupaten compared to the others. For example, in terms of program coverage of the poor, Rembang has the highest number of programs, and hence can be considered the best performing kabupaten in the group. Three boldface numbers indicate this. However, the kabupaten with the lowest performance scores are Karang Asem, Pandeglang, Sumedang, and Kutai. None of these display bold type.

In terms of the targeting ratio, the kabupaten with the highest number of best performances within a certain program are Indragiri Hilir, Pandeglang, Sumedang, Rembang, and Karang Asem. There are two boldtype scores in each of these kabupaten. On the other hand, the kabupaten with the lowest performance scores are South Lampung and Kutai. No program in either kabupaten places them in the category of the best four in terms of the targeting ratio.

The case of Rembang, the kabupaten which has the highest numbers of best performances in terms of both program coverage and targeting ratio, seems to suggest that a kabupaten which receives a lot of resources will have a better chance to achieve good program coverage and targeting of the poor. On the other hand, Pandeglang, Sumedang, and Karang Asem are the three kabupaten with the lowest performance scores in terms of program coverage, but at the same time one of them, Pandeglang, has the highest number of best performances in terms of targeting ratio. This appears to imply that program coverage can be quite independent from effective targeting toward the

dalam tiga langkah: pertama, sampel dari masing-masing kabupaten dikelompokkan menurut pengeluaran per kapita berdasarkan kuantil, dimana kuantil pertama (Q1) diklasifikasikan sebagai keluarga miskin, sedang kuantil ke dua hingga ke lima (Q2-Q5) sebagai keluarga tidak miskin; kedua, cakupan program dihitung untuk masing-masing kuantil, yaitu: untuk memperoleh persentase keluarga dalam masing-masing kuantil yang menjadi penerima program; dan ketiga, efektivitas sasaran masing-masing program dihitung sebagai perbandingan partisipasi keluarga tidak miskin dalam program tersebut dibandingkan dengan persentase keluarga tidak miskin dalam sampel.

Program yang dipilih untuk kebutuhan analisis adalah: OPK atau Operasi Pasar Khusus, program padat karya atau penciptaan lapangan kerja, dan program beasiswa Sekolah Dasar sebagai komponen program JPS dibidang pendidikan. Hasil dari cakupan dan efektivitas sasaran beberapa program JPS yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 1998/99 dengan menggunakan metoda tersebut diatas disampaikan dalam Tabel 1,2, dan 3 berikut ini. Dalam semua tabel, 10 kabupaten yang dikaji disusun menurut urutan tertinggi hingga terendah.

Tabel 4 merekapitulasi semua cakupan program untuk keluarga miskin dan efektivitas sasaran dari Tabel 1 hingga 3. Pada Tabel ini disajikan besarnya cakupan keluarga miskin (kuantil terendah) dan efektivitas sasaran untuk masing-masing program, serta urutan kinerja relatif tiap kabupaten dalam pelaksanaan masing-masing program yang tercantum. Untuk mempermudah identifikasi kabupaten dengan kinerja terbaik dalam suatu program, maka cakupan mereka terhadap keluarga miskin dan angka efektivitas sasaran dicetak dengan huruf tebal. Misalnya, untuk program OPK, empat kabupaten yang mempunyai kinerja terbaik dalam cakupan keluarga miskin adalah Kabupaten Rembang, Banjarnegara, Kendari dan Lampung Selatan, sementara empat kabupaten terbaik di bidang efektivitas sasaran adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Pandeglang, Sumedang dan Karang Asem. Identifikasi kabupaten dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program-program lainnya juga dapat dilakukan dengan cara sama.

Di samping itu, Tabel 4 dapat digunakan sebagai kartu penilaian untuk menunjukkan kinerja relatif masing-masing kabupaten dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Misalnya, di bidang cakupan program bagi keluarga miskin, Kabupaten Rembang mempunyai jumlah program tertinggi di mana kabupaten ini menjadi salah satu dari kabupaten dengan kinerja terbaik. Hal ini terlihat dari tiga angka dicetak dengan huruf tebal. Sebaliknya, kabupaten-kabupaten yang mempunyai angka kinerja terendah adalah Kabupaten Karang Asem, Pandeglang, Sumedang dan Kutai. Keempat kabupaten itu tidak mempunyai angka yang dicetak dengan huruf tebal.

Dalam hal efektivitas sasaran, kabupaten yang mempunyai angka tertinggi sebagai kabupaten dengan kinerja tinggi di bidang program tertentu adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Pandeglang, Sumedang, Rembang dan Karang Asem. Masing-masing kabupaten mempunyai dua angka dengan huruf tebal. Sebaliknya, kabupaten dengan kinerja terendah adalah Kabupaten Lampung Selatan dan Kutai. Tak ada satupun program menempatkan kedua kabupaten ini dalam jajaran empat besar dalam kategori efektivitas sasaran.

Kinerja Kabupaten Rembang yang mempunyai angka tertinggi sebagai kabupaten berkinerja terbaik baik di bidang cakupan keluarga miskin maupun efektivitas sasaran menunjukkan bahwa suatu kabupaten yang

poor.

Unfortunately, the overall findings of this study indicate that in many cases the programs due to low coverage and loose targeting have largely missed the intended target beneficiaries. It should be emphasized, however, that the effectiveness of the SSN program varies between particular programs and from one region to another. This raises an interesting avenue for future research to account for these targeting outcomes. The general conclusion from this study points to the need for a substantial improvements in the implementation of these programs, in particular in targeting the intended beneficiaries of a particular program and increasing the coverage within the target group.

menerima banyak sumber daya akan mampu memperoleh cakupan program dan mencapai sasaran keluarga miskin yang baik. Sebaliknya, Pandeglang, Sumedang dan Karang Asem adalah tiga kabupaten yang mempunyai kinerja rendah mengenai cakupan program keluarga miskin, tetapi pada saat yang sama salah satu dari kabupaten tersebut, yaitu Pandeglang, mampu mendapat angka tertinggi dalam efektivitas sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan program bisa saja tidak terkait dengan efektivitas penentuan sasaran keluarga miskin.

**Tabel 2. Cakupan dan Sasaran Program Padat Karya Berdasarkan Konsumsi Kuantil per Kapita**

**Table 2. Coverage and Targeting of Employment Creation Program by Per Capita Consumption Quintiles**

Kabupaten, Propinsi District, Province	Jumlah Sampel Number of Sample	Cakupan Program Program Coverage (%)	Cakupan program Relatif terhadap Kuantil 1 Program Coverage Relative to Quintile 1					Cakupan Program Program Coverage (%)	Sasaran Program Program Targeting	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5		Q2-Q5	% Q2-Q5
Kupang, East Nusa Tenggara/NTT	1,198	48.75	0.64	0.75	0.62	0.33	28.60	70.12	0.88	
Kendari, Southeast Sulawesi/ SulTeng	1,200	27.08	0.89	0.52	0.37	0.18	13.33	66.32	0.83	
Lampung Selatan, Lampung	1,200	26.67	0.64	0.89	0.77	1.23	23.54	77.93	0.97	
Rembang, Central Java/JaTeng	1,200	21.25	0.61	0.49	0.33	0.18	8.54	61.65	0.77	
Pandeglang, West Java/JaBar	1,200	10.42	0.76	0.80	0.52	0.16	5.83	69.14	0.86	
Sumedang, West Java/JaBar	1,200	8.75	1.05	1.10	1.10	0.14	7.40	77.17	0.96	
Karang Asem, Bali	1,200	6.67	1.12	0.44	0.25	0.00	3.02	64.44	0.81	
Kutai, East Kalimantan/KalTim	1,199	0.42	5.00	4.00	3.00	1.00	1.36	92.86	1.16	
Banjarnegara, Central Java/JaTeng	1,200	0.42	7.00	2.00	0.00	1.00	1.04	90.91	1.14	
Indragiri Hilir, Riau	1,200	0.00	-	-	-	-	0.21	100.00	1.25	

**Tabel 3. Cakupan dan Sasaran Program Beasiswa Sekolah Dasar Berdasarkan Konsumsi Kuantil per Kapita**

**Table 3. Coverage and Targeting of Primary School Scholarship Program by Per Capita Consumption Quintiles**

Kabupaten, Propinsi District, Province	Jumlah Sampel Number of Sample	Cakupan Program Program Coverage (%)	Cakupan Program Relatif Terhadap Kuantil 1 Program Coverage Relative to Quintile 1					Cakupan Program Program Coverage (%)	Sasaran Program Program Targeting	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5		Q2-Q5	% Q2-Q5
Banjarnegara, Central Java/JaTeng	602	38.02	0.92	0.67	0.59	0.35	24.12	71.73	0.90	
Rembang, Central Java/JaTeng	522	10.48	0.46	0.36	0.28	0.28	3.60	57.87	0.72	
Indragiri Hilir, Riau	551	8.11	0.56	0.67	0.45	0.90	5.23	72.06	0.90	
Kendari, Southeast Sulawesi/SulTeng	656	6.06	1.89	1.89	1.76	1.76	11.07	87.96	1.10	
Karang Asem, Bali	420	5.95	2.00	1.80	0.20	1.00	7.44	83.33	1.04	
Pandeglang, West Java/JaBar	643	3.88	0.80	0.81	1.00	0.81	3.31	77.34	0.97	
Sumedang, West Java/JaBar	459	3.26	0.00	0.33	0.00	0.00	0.27	25.05	0.31	
Kupang, East Nusa Tenggara/NTT	582	2.56	1.68	2.00	3.03	4.37	7.10	91.72	1.15	
Lampung Selatan, Lampung	620	2.42	2.00	1.33	4.33	4.33	7.26	92.31	1.15	
Kutai, East Kalimantan/KalTim	467	2.13	1.01	0.00	1.01	1.52	1.88	77.92	0.97	

Our next step in evaluating the effectiveness of the SSN programs is to separate the “permanent” and the “transitory”

Secara umum, temuan dari kajian ini membuktikan bahwa dalam banyak hal kelompok sasaran tidak terjangkau oleh

components of household income and expenditure to capture the impact of the crisis on household income, and also to identify more important components to be used as the determinant of participation in the SSN or program recipients. ■ AS,YS,SSm

\* This article is a summary of a SMERU working paper on "Coverage and Targeting in the Indonesian Social Safety Net Programs" by Asep Suryahadi, et al., 1999.

<sup>1</sup> See Suryahadi and Sumarto (1999) in "Update on the Impact of the Indonesian Crisis on Consumption Expenditures and Poverty Incidence: Results from the December 1998 Round of 100 Village Survey" and Molyneaux (1999) in "Descriptive Statistics and Analysis of the First Two Rounds of the 100 Village Survey" for a more detailed description of the 100 Village Survey.

<sup>2</sup> Bidani and Ravallion (1993) in "A Regional Poverty Profile for Indonesia" emphasize the importance of targeting in any effort to help the poor in Indonesia. They estimate that the cost of assuring that everyone can afford the poverty food bundle without targeting is about 100 times the cost with perfect targeting.

\* Artikel ini adalah ringkasan kertas kerja SMERU berjudul "Coverage and Targeting in the Indonesian Social Safety Net Programs" oleh Asep Suryahadi, et al., 1999.

<sup>1</sup> Lihat Suryahadi dan Sumarto (1999) dalam "Update on the Impact of the Indonesian Crisis on Consumption Expenditures and Poverty Incidence: Results from the December 1998 Round of 100 Village Survey" dan Molyneaux (1999) dalam "Descriptive Statistics and Analysis of the First Two Rounds of the 100 Village Survey" untuk pembahasan lebih lanjut Survei 100 Desa.

<sup>2</sup> Pentingnya menetapkan sasaran dalam upaya menolong keluarga miskin di Indonesia ditegaskan oleh Bidani dan Ravallion (1993) dalam "A Regional Poverty Profile for Indonesia". Mereka memperkirakan bahwa biaya untuk memastikan bahwa setiap orang dapat membeli paket hemat bahan pangan tanpa penetapan sasaran adalah 100 kali lebih tinggi daripada bila memiliki sasaran sempurna.

program JPS karena cakupannya rendah dan penentuan sasaran program tidak ketat. Perlu ditekankan bahwa efektivitas masing-masing program berbeda, tergantung pada jenis program dan wilayah. Temuan ini membuka peluang bagi tim untuk melakukan kajian lebih lanjut untuk menjelaskan penyebab perbedaan hasil sasaran antar kabupaten. Kesimpulan umum kajian ini adalah masih dibutuhkan perbaikan mendasar dalam pelaksanaan program, terutama dalam menetapkan pihak penerima program, dan dalam meningkatkan cakupan di dalam kelompok sasaran.

Kajian lebih lanjut dalam mengevaluasi efektivitas program JPS adalah memisahkan komponen "permanen" dan "sementara" dari pendapatan dan pengeluaran rumah-tangga agar dapat mengetahui dampak krismon terhadap pendapatan rumah tangga, dan untuk mengetahui komponen mana yang lebih penting sebagai penentu keikutsertaan dalam program JPS atau sebagai penerima manfaat program. ■ AS,YS,SSm

**Tabel 4. Rekapitulasi Cakupan dan Sasaran Tiga Program JPS (Empat ranking tertinggi pada masing-masing kategori dicetak dalam warna merah)**

**Table 4. Recapitulation on Coverage and Targeting of Three Selected SSN Programs (Four highest rank in each category printed in red color)**

Kabupaten District	OPK Cheap Rice Program	Padat Karya Employment Creation	Beasiswa SD Primary Scholarship			
Cakupan Keluarga Miskin Coverage of Q1 (%)	Rangking Rank	Rangking Rank	Rangking Rank			
Indragiri Hilir	34.58	6	0.00	10	8.11	3
Lampung Selatan	58.33	4	26.67	3	2.42	9
Pandeglang	20.00	8	10.42	5	3.88	6
Sumedang	19.58	9	8.75	6	3.26	7
Banjarnegara	93.75	2	0.42	8	38.02	1
Rembang	97.92	1	21.25	4	10.48	2
Karang Asem	34.17	7	6.67	7	5.95	5
Kupang	42.92	5	48.75	1	2.56	8
Kutai	5.42	10	0.42	8	2.13	10
Kendari	67.08	3	27.08	2	6.06	4
Efektivitas Sasaran Targeting Ratio:						
Indragiri Hilir	0.74	1	1.25	10	0.90	3
Lampung Selatan	0.94	6	0.97	7	1.15	9
Pandeglang	0.83	2	0.86	4	0.97	5
Sumedang	0.88	3	0.96	6	0.31	1
Banjarnegara	0.98	9	1.14	8	0.90	3
Rembang	0.93	5	0.77	1	0.72	2
Karang Asem	0.90	4	0.81	2	1.04	7
Kupang	0.96	8	0.88	5	1.15	9
Kutai	1.17	10	1.16	9	0.97	5
Kendari	0.95	7	0.83	3	1.10	8

## Bergelut Menanggulangi Kesulitan Coping with Adversity

### ■ Some first hand accounts of families experiences after the crisis / Pengalaman langsung beberapa keluarga setelah dilanda krisis ■

While observing the impact of the economic crisis (krismon) on the labor force last May, the SMERU Team spoke to some of those who become victims of the on-going crisis. As promised in our last issue, this edition features a special profile of several families whose lives have been affected.

Saat Tim SMERU melakukan pengamatan terhadap pengangguran sebagai akibat krismon pada akhir bulan Mei 1999 yang lalu, Tim SMERU sempat bertemu dengan mereka yang telah menjadi korban krismon. Sebagaimana dijanjikan pada edisi lalu, khusus Newsletter edisi ini kami tampilkan profil kehidupan empat keluarga yang terkena dampak.

### Sebuah Keluarga Mencoba Bertahan Hidup Setelah Terkena Dampak PHK A Family Struggling to Survive after Retrenchments

Pak M is a retired sixty-year old low-ranking army officer living in a low-cost housing complex in Bekasi. He had bought his house when he was still on active duty. The army had provided the initial deposit, but he must continue to repay Rp. 58,000 in monthly installments. For additional income, Pak M gives Koran reading lessons and recites prayers upon request at ceremonial occasions in his neighborhood. But his incomes from those sources are highly irregular, since they depend on the requests for his services and the capacity of his neighbors to pay.

Pak M (60 tahun) adalah seorang pensiunan ABRI yang tinggal di perumahan sederhana di Bekasi. Rumah ini dibeli ketika ia masih bertugas. Uang muka pembelian ditanggung oleh kantor tetapi ia wajib mencicil angsuran sekitar Rp. 58.000,- per bulan. Untuk menambah penghasilan, Pak M menjadi guru mengaji dan membacakan doa kalau ada upacara di kampungnya. Penghasilan dari kedua kegiatan itu sangat tidak menentu karena tergantung ada tidaknya acara dan berdasarkan kerelaan si pemberi.

Of his five children and one son-in-law who were formerly working in a shoe factory, only two have retained their jobs. Two of his children and a daughter-in-law did not receive any severance pay at the time of their retrenchment. One lost his job because of illness, another because he arrived for work late too often, while the daughter-in-law was retrenched because she was about to give birth. Another son who remains unemployed and is still living at home received some severance pay at the time of his dismissal.

Dari lima orang anak dan seorang menantu yang semula bekerja di pabrik sepatu, hanya dua orang yang kini masih bekerja. Dua orang anaknya dan seorang menantunya telah di PHK tanpa uang pesangon. Satu orang kehilangan pekerjaan karena sakit, seorang lainnya karena sering terlambat masuk kantor, sedang sang menantu di PHK karena akan melahirkan. Seorang anak lainnya yang masih menganggur dan tinggal bersama Pak M menerima sejumlah pesangon ketika di PHK.

Three of Pak M's retrenched children are still effectively jobless. One son helps washing his older brother's angkot vehicle, or sometimes works as an ojek driver. The other works as an occasional angkot driver with an irregular income. According to his two sons, since they were laid-off they prefer not to sleep in their parents' house because they are concerned that the neighbors may suspect them if someone's chickens are stolen. One son-in-law has just been re-employed in a biscuit factory, but his recently retrenched daughter is still out of work and remains at home.

Tiga dari anak Pak M yang telah di PHK belum mendapat pekerjaan lagi. Satu orang membantu mencuci kendaraan angkot milik abangnya, atau kadang menjadi pengojek. Satu orang lainnya hanya menjadi sopir angkot tembak dengan penghasilan tak menentu. Menurut kedua anaknya tersebut, setelah menganggur mereka jarang tinggal di rumah orang tuanya karena sering dicurigai warga setempat sebagai pencuri, misalnya ketika ayam tetangga hilang. Satu orang menantu telah bekerja kembali di pabrik biskuit. Sedangkan seorang anak perempuan Pak M yang belum lama di PHK sampai sekarang belum bekerja kembali dan masih tinggal di rumah.

According to Pak M, family life has become much more difficult after his children unemployed. Almost all his children, their spouses and his grandchildren are living in his small house and have to be supported. They have reduced their food consumption, and now the menu usually only consists of vegetables. Sometimes they do not even have enough food so that those who come home late miss out on their food. Pak M still has to pay the monthly installments on his house for another 3 years. At present his children are helping each other so that he can manage to keep his household afloat and withstand the blows that the economic crisis has brought. ■

Menurut penuturan Pak M, penghidupan keluarga menjadi sangat sulit setelah anak-anaknya di PHK. Hampir semua anak, menantu dan cucu tinggal di rumahnya yang sempit. Konsumsi makanan merosot dan seringkali mereka hanya makan dengan sayur. Kadang-kadang jumlah porsinya tidak cukup untuk semua, jadi siapa yang terlambat datang tidak akan kebagian jatah. Pak M kini juga masih terbebani cicilan rumah yang baru akan lunas tiga tahun lagi. Hanya karena adanya saling tolong-menolong di antara anak-anaknya, maka kebutuhan keluarga masih bisa tertutup dan mampu menahan terpaan krismon. ■

## Profil Pekerja Korban PHK yang telah Memperoleh Pekerjaan Baru Retrenched Workers Who Have Found New Jobs

**Two retrenched workers now relying on the husband's income as a construction worker**

Ibu R is a 26 year-old high school graduate, who had been working in a shoe factory outside Bogor since 1993. When she was laid-off, this mother of an eight month-old baby received severance pay of nearly Rp. 3,000,000 or 15 times her final monthly salary, plus some additional payment from the company cooperative. About Rp. 600,000 of the money was used to pay rent for ten months on a house located near the factory. This will provide the family with a roof over their heads until June 1999. The remainder was used to visit their parents in South Sumatra and to cover their daily living expenses. Now that all the money has been spent, Ibu R can only rely on her husband's income. He had just been retrenched from a sack factory, and now was working as a construction worker on daily-hire basis earning Rp. 14,000 a day plus Rp. 5,000 for food allowance.

The family income has been significantly reduced and the husband has no security of employment. As a result this couple feels strongly the impact of being retrenched. To be able to survive, this family has to reduce the quality of their food consumption although they have managed to maintain its quantity. Now and then they are forced to ask for help from their parents.

Although for some reasons she has not made much effort to look for work, Ibu R is hoping to find a job again soon, especially so that she can afford to buy milk powder for her baby. In June when the period of her house rent is over and if work was still not available, the family is planning to return to their parental home in South Sumatra where they intend to help cultivate the family's small rubber plantation. ■

**Sepasang suami istri Korban PHK terpaksa hanya mengandalkan penghasilan suami sebagai Buruh Bangunan**

Ibu R, 26 tahun, adalah tamatan SLTA yang sudah bekerja di sebuah pabrik sepatu di pinggiran kota Bogor sejak tahun 1993. Ketika harus di PHK, ibu dari satu anak berusia 8 bulan ini mendapat pesangon sekitar Rp. 3.000.000,- yaitu kelipatan 15 dari gaji terakhirnya ditambah dengan sedikit uang koperasi. Sekitar Rp. 600.000,- dari uang pesangonnya digunakan untuk membayar sewa rumah di dekat pabrik selama 10 bulan hingga bulan Juni 1999. Selebihnya untuk biaya mudik ke kampung orang tuanya di Sumatera Selatan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekarang uang pesangon tersebut sudah habis, dan Ibu R hanya dapat mengandalkan penghasilan suaminya. Suaminya baru saja kena PHK dari pabrik karung dan sekarang bekerja sebagai buruh bangunan lepas dengan penghasilan Rp. 14.000,- per hari ditambah uang makan Rp. 5.000,-

Karena penghasilan keluarga berkurang banyak sementara pekerjaan suami tidak selalu ada setiap hari, keluarga ini sangat merasakan dampak PHK. Agar dapat bertahan hidup, keluarga ini mengurangi kualitas konsumsi meskipun masih dapat menjaga kuantitasnya. Sekali-sekali mereka minta bantuan ke orang tua.

Walaupun belum pernah mencoba, Ibu R sudah berencana mencari pekerjaan lagi, terutama untuk mencukupi kebutuhan susu bayinya. Apabila hingga bulan Juni saat kontrak rumah habis dan Ibu R belum juga memperoleh pekerjaan, mereka merencanakan untuk pulang ke rumah orang tua Ibu R di Sumatera Selatan, dan selanjutnya akan membantu mengolah kebun karet kecil milik keluarga. ■

## Profil Pekerja Korban PHK yang Masih Menganggur Profile of a Retrenched Worker Who Remains Unemployed

**Victim of retrenchment, a widow with two children forced to live with her mother**

Ibu S, 33 years old, was retrenched from the shoe factory where she used to work. Her last job was as a seamstress with a basic salary of Rp. 186,000. With frequent overtime, she was usually able to take home as much as Rp. 400,000 each month. A Junior High School graduate, this widow has two children to support, the eldest in grade 2 at secondary school and the youngest in grade 3 at primary school.

From her severance pay of Rp. 2.8 million, she set aside Rp. 1.5 million as a bank deposit earning monthly interest of Rp. 35,000. The rest of the money was to cover daily living expenses. With no money left to pay rent, Ibu S and her two children are now living with her mother in Desa Margajaya, Bogor.

Since her retrenchment the family has been forced to cut back on the amount they spent on food. However, the children's schooling have not been affected because the monthly school fees of Rp. 80,000 are paid by her former husband. Knowing that jobs are hard to find, Ibu S has no plans to look for work at present. Besides, rumor has it that other companies have blacklisted the former workers of the

**Korban PHK, seorang janda beranak dua yang terpaksa menumpang di rumah ibunya**

Ibu S, 33 tahun, harus menjadi korban PHK sebagai dampak krisis yang menerpa sebuah pabrik sepatu. Terakhir ia bekerja sebagai tukang jahit dengan gaji pokok Rp. 186.000,- per bulan dan bila lembur bisa memperoleh penghasilan hingga Rp. 400.000,- per bulan. Janda tamatan SMP ini mempunyai dua anak yang masih sekolah di kelas 2 SMP dan kelas 3 SD.

Uang pesangon yang diterima sebesar Rp. 2,8 juta telah didepositokan sebesar Rp. 1,5 juta, sehingga setiap bulan bisa memperoleh bunga sebesar Rp. 35.000,-. Sisa pesangon kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena sudah tidak ada biaya untuk mengkontrak rumah, Ibu S beserta kedua anaknya terpaksa menumpang di rumah ibunya di Desa Margajaya, Bogor.

Sejak terkena PHK pengeluaran untuk makanan terpaksa dikurangi, namun anaknya masih bisa bersekolah karena biaya sebesar Rp. 80.000,- per bulan tetap ditanggung oleh bekas suami Ibu S. Menyadari bahwa saat ini sulit mendapat pekerjaan, hingga sekarang Ibu S belum mempunyai rencana untuk bekerja lagi. Apalagi menurut

shoe factory where she was employed because some of them had organized protests demanding higher severance pay. ■

kabar teman-temannya, perusahaan-perusahaan lain telah memasukkan para pekerja dari perusahaan sepatu dimana ia pernah bekerja ke dalam daftar hitam, karena pekerja pabrik tersebut pernah demonstrasi menuntut tambahan pesangon. ■

## Dampak PHK bagi Masyarakat Sekitar Pabrik Impact of Retrenchment on the Local Community

### A head of neighborhood community who had 30 rooms to rent and a public transport vehicle

As a well-known person in the local community, Bapak RW has observed the significant impact of the closedown of one of the large shoe factories on the local economy of the community living nearby. Nearly all families living in the vicinity of the factory earned income by providing accommodation for factory workers. A room may fetch between Rp. 40,000 to Rp. 50,000 every month. But with the high number of retrenched workers in the labor-intensive footwear industry, many rooms are now left empty. Pak RW himself owns 30 rooms that usually have a reasonably high occupancy rate, but only ten of these are still rented. Due to this crisis, his monthly income has declined between Rp. 800,000 to Rp. 1 million.

According to Pak RW, the closure of the shoe factory has also affected those people who own angkot and many of the peddlers who operate in this area. For example, when the factory was still operating, from 5 a.m. to 10 a.m. Pak RW's own angkot could earn him up to Rp. 30,000 but these days he may not make that much even if he works until late in the evening.

Since his family's main sources of income from angkot and rental accommodation has been significantly reduced, shortly after the last Idul Fitri Pak RW was forced to sell his angkot for Rp. 8 million. The money was used to support his wife and four children, three of whom are still at high school. As the economic condition has not improved, Pak RW is skeptical about whether his children will be able to continue their education. However, the eldest, a high school graduate, has started to help the family by starting his own kiosk, selling bird food. Pak RW remains hopeful that Indonesian's economic situation will soon begin to improve. ■

### A street vendor who has been forced to change direction

Pak S used to have quite a profitable business as a street vendor selling clothes to factory workers from one of the large textile factories on the outskirts of Bandung. During that time his daily net income was usually about Rp. 20,000 although occasionally he managed to take home as much as Rp. 75,000. But after the factory closed the number of customers dwindled to the point where he decided to change to selling bubur merah delima (a pink-colored tapioca porridge). However, this proved to be not very popular, besides it did not keep for long, so he soon switched to selling bubur kacang hijau (mung bean porridge). Today he is still toiling away selling porridge that earns him an average profit of Rp. 5,000 to Rp. 10,000 every day, a significant decline in his income compared with what he was able to earn when the factories were operating. ■

### Nasib seorang ketua RW yang memiliki 30 kamar kost dan sebuah kendaraan angkutan umum

Sebagai tokoh masyarakat, Bapak RW melihat adanya pengaruh cukup besar dari ditutupnya salah satu pabrik sepatu besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pabrik. Hampir setiap keluarga di kawasan tersebut mendapat penghasilan dari menyewakan kamar-kamar pada pekerja pabrik. Satu kamar rata-rata menghasilkan Rp. 40.000,- – Rp. 50.000,- per bulan. Dengan banyaknya pekerja industri sepatu padat karya yang di PHK, otomatis banyak kamar yang kosong. Pak RW sendiri mempunyai 30 kamar yang biasanya relatif penuh, sekarang hanya tinggal 10 kamar yang tersewa. Akibat krisis ini, penghasilan dari sewa kamarnya telah berkurang antara Rp. 800.000,- hingga Rp. 1 juta per bulan.

Menurut Pak RW, penutupan pabrik sepatu di wilayah ini juga berpengaruh terhadap pemilik angkot dan para pedagang kecil. Sebagai contoh, ketika pabrik masih jalan, dari pukul 05.00 hingga pukul 10.00 pagi angkot milik Pak RW dapat menghasilkan Rp. 30.000,- Tetapi setelah pabrik tutup, meskipun bekerja hingga menjelang malam belum tentu memperoleh jumlah sebesar itu.

Karena penghasilan utama keluarga dari angkot dan sewa kamar sudah sangat berkurang, setelah Lebaran Idul Fitri tahun lalu Pak RW terpaksa menjual angkotnya seharga Rp. 8 juta. Hasil jual digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari satu istri dan empat anak, tiga di antaranya masih sekolah di SMA dan SMP. Melihat kondisi perekonomian saat ini yang belum membaik, Pak RW agak ragu mengenai kelangsungan pendidikan ketiga anaknya, meskipun anak tertua yang sudah lulus dari SMA sudah bisa membantu dengan membuka kios pakan burung. Harapannya, kondisi perekonomian Indonesia dapat segera pulih kembali. ■

### Seorang pedagang keliling yang terpaksa berganti-ganti barang jualannya

Sebagai pedagang keliling, penghasilan Pak S dari menjual pakaian kepada pekerja salah satu pabrik tekstil terbesar di pinggiran kota Bandung lumayan juga. Waktu itu ia berpenghasilan bersih sekitar Rp. 20.000,- bahkan kadang-kadang bisa mencapai Rp. 75.000,- per hari. Tetapi setelah pabrik ditutup, dagangannya menjadi sepi sehingga ia terpaksa beralih berjualan bubur merah delima. Ternyata makanan ini tidak terlalu laku dan tidak tahan lama, sehingga ia kemudian berubah berjualan bubur kacang hijau. Hingga sekarang Pak S masih bergelut menjual bubur kacang hijau. Rata-rata penghasilan bersihnya sekitar Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,- per hari. Ini adalah penurunan pendapatan yang luar biasa dibanding dengan ketika pabrik-pabrik masih beroperasi. ■



What's the impact of the crisis  
on health and education ?  
Get hold of our next issue!

Apa dampak krismon terhadap  
kesehatan dan pendidikan?  
Nantikan edisi SMERU yang  
akan datang!



The SMERU newsletter is published to share ideas and to invite discussion on the social crisis in Indonesia from a wide range of viewpoints. The findings, views, and interpretations published in the articles are those of the authors and should not be attributed to the World Bank group or any of the agencies providing financial support to SMERU. Comments are welcome. If you would like to be included on our mailing list, please contact SMERU at 021-3909317, 3909363; fax at 021-3907818. Jl. Subang No. 22 Menteng, Jakarta 10310